



LEMBAGA TERAJU INDONESIA

Jl. Budi Utomo, Komp. Pondok Pangeran Blok J, Siantan Hulu, Pontianak, Kalimantan Barat
Email: terajufoundation@gmail.com , Telp. 0857 5085 6012

Harga Minyak Goreng Menggila Buruh Sawit Menderita

Beberapa bulan ini, bertebaran berita tentang kenaikan harga minyak goreng kemasan, dan curah, kenaikan minyak goreng dikarenakan kenaikan Harga CPO di pasaran internasional. Masyarakat pun panik kemudian pemerintah hadir seolah menjadi pahlawan dengan langkah mereka menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan kelasnya. Eceran Rp. 11,000/liter dan Premium (kemasan) Rp. 14.000/liter, kata mereka sudah dalam mekanisme subsidi.

Subsidi minyak goreng menggunakan dana yang di Kelola oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Subsidi ini pun mengalami pro dan kontra, terutama dari organisasi petani sawit. Hal ini wajar karena selama ini dana yang terkumpul di BPDPKS, dinikmati oleh perusahaan perkebunan sawit yang menjadi pemasok bahan baku Biodiesel.

Sudah diketahui bahwa Indonesia menjadi negara pemilik perkebunan sawit terluas di dunia dan penghasil CPO terbesar dan ekspor CPO tertinggi di dunia. Jadi, alasan karena kenaikan harga CPO dunia yang kemudian menyebabkan harga minyak goreng naik di Indonesia, menunjukkan ketidakberdaulatnya pemerintah dalam tata kelola sektor perkebunan sawit dari hulu sampai hilir. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga adanya indikasi kartel minyak sawit yang menyebabkan harga minyak goreng melambung tinggi.

Pemilik minyak goreng di Indonesia

Nama	Perusahaan	Kekayaan \$
Martua Sitorus	KPN/GAMMA - Wilmar	2,9 miliar USD
Anthoni Salim	Indofood, Salim Ivomas Pratama, London Sumatera Tbk	5,9 miliar USD
Keluarga Wijdjaja	Sinarmas, GAR,	
Sukanto Tanoto	Raja Garuda Emas (RGEI) April, Apical, Asian agri	2,1 Miliar USD
Bachtiar Karim	Musim Mas Group	3,1 miliar USD

Tetap saja harga minyak goreng masih di atas Rp. 15.000/liter di beberapa tempat di luar pulau Jawa. Sungguh sangat ironis dan menyedihkan sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia.

Dalam rantai produksi minyak sawit (CPO) tidak bisa dilepaskan atau dilupakan adalah kaum buruh baik itu buruh perkebunan yang mengelola, merawat, dan memanen buah sawit sampai dibawa ke pabrik pengolahan yang memproses tandan buah sawit menjadi CPO. Kemudian CPO tersebut dikirim ke pabrik produksi barang jadi, salah satunya adalah minyak goreng.

Mahalnya minyak goreng dipastikan akan menguntungkan pengusaha perkebunan sawit yang menguasai hulu dan hilir produksi seperti 5 nama di atas. Termasuk juga pedagang ritel seperti Indomart, Alfamart dan Supermarket/minimarket lainnya. Termasuk juga pasar-pasar modern yang dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan sawit dan pabrik pengolahan. Masyarakat menjerit karena minyak goreng mahal, petani sawit pun menjerit karena pemerintah menurunkan harga minyak goreng dengan mensubsidi harga minyak goreng yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Belum habis cerita dana BPDPKS untuk biodiesel dan kini untuk minyak goreng lagi.

ternyata **79%** atau sebesar **Rp110** triliun dari total penerimaan pungutan CPO dari tahun 2015-2021, habis untuk 'subsidi' pengusaha dalam program Biodiesel. Sementara pemberian bantuan kepada petani kecil dalam program PSR sangat kecil.

Distribusi Penggunaan Dana Pungutan Ekspor CPO dari Tahun 2015-2021



Mahalnya minyak goreng pun dirasakan oleh produsen yang menghasilkan minyak goreng, yaitu para buruh perkebunan sawit. Kenaikan harga CPO, mahalnya harga minyak goreng dan besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah, tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan buruh-buruh perkebunan sawit. Potong ekspor yang dipungut oleh pemerintah telah membebani buruh perkebunan sawit karena berdampak pada upah yang tetap bahkan lebih rendah, jam/hari kerja dikurangi sehingga upah yang diterima rendah. Hak-hak lain yang merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan pun terabaikan. Bahkan kini banyak buruh diminta untuk berhenti atau di PHK dengan alasan mengundurkan diri sehingga hak-haknya berupa pesangon, jasa kerja dan hak lainnya akan hilang dan hanya mendapatkan tali asih/kompensasi dari perusahaan. Bahkan ada yang sengaja dicari kesalahannya dengan tuduhan mangkir.

Celaknya, kondisi kerja buruk yang dirasakan oleh buruh perkebunan sawit tidak menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Kasus-kasus atau permasalahan buruh perkebunan seperti PHK sepihak, beban kerja yang tinggi, jaminan kesehatan yang rendah merupakan kasus atau permasalahan yang sering diutarakan dan dilaporkan kepada pemerintah. Namun berujung terbalik disisi pemerintah mengatakan bahwa produktivitas perkebunan sawit rendah disebabkan oleh buruh. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kondisi buruh/pekerja jauh dari amanat UUD 1945 dan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang di buat pemerintah dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Yang terjadi adalah sebaliknya, malah memiskinkan rakyat. Buruh perkebunan sawit merupakan aktor utama dalam peningkatan pundi-pundi perusahaan dan pendapatan negara hanya bisa meratapi nasib dalam ketidakpastian politik ekonomi saat ini.

Keuntungan perusahaan dari kenaikan harga CPO dan kenaikan harga minyak goreng, dan keuntungan yang didapat oleh pemerintah dari pajak ekspor, merupakan hasil kerja keras dan keringat panjang penderitaan buruh perkebunan sawit. Dari penderitaan tersebut, menghasilkan kebahagiaan di segelintir orang dan kenikmatan orang-orang kota yang berteriak mahalnya harga minyak goreng namun tidak melihat bagaimana penderitaan buruh perusahaan perkebunan sawit yang telah memberikan kenikmatan dan kebahagiaan bagi pengusaha, oligarki dan orang-orang kota lainnya.

Pemerintah seakan-akan tutup mata dengan penderitaan buruh-buruh perkebunan sawit sehingga tidak ada satu pun regulasi yang diciptakan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan perlindungan terhadap buruh-buruh perkebunan sawit yang jumlahnya diatas 3 juta orang. Justru malah sibuk dengan pemilu ditunda atau lanjut.

Sebagai produsen, mahalnya harga minyak goreng ini juga menambah tumpukan beban-beban sebelumnya dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari hari mereka seperti makanan sehat untuk keluarga, biaya sekolah anak yang untuk memenuhinya mereka (buruh) harus bekerja lebih untuk mendapatkan upah lembur atau bahkan bekerja di tempat lain. Khusus buruh perempuan lebih tragis penderitaan yang mereka rasakan, banyak buruh perempuan yang berkerja di perkebunan sawit pada bagian pemupukan yang tentunya bersentuhan langsung dengan bahan-bahan kimia. Buruh perempuan di bagian pemupukkan harus menghabiskan kurang lebih 300 kilogram pupuk yang ditabur dengan berat masing-masing pupuk perkarung 50 kilogram dengan bayaran 1 hari kerja (HK) sebesar Rp 100,000. Pulang berkerja buruh perempuan yang telah berumah tangga harus mengurus rumah tangga, meyiapkan makan keluarga dan lain-lain.

Buruh perkebunan sawit yang merupakan aktor utama, justru tidak menikmati kenaikan harga CPO, minyak goreng dan subsidi yang di terima perusahaan. Justru buruh perkebunan sawit juga harus merasakan dampak mahalnya minyak goreng. Jadi dapat disimpulkan penderitaan buruh perkebunan sawit 3 kali lebih menderita dibandingkan dengan teriakan mahalnya minyak goreng.

Penulis : Teraju Foundation

Editor : Teraju Foundation

Sumber informasi:

1. <https://money.kompas.com/read/2022/01/24/080147726/deretan-konglomerat-penguasa-minyak-goreng-di-indonesia?page=all>
2. <https://www.mongabay.co.id/2020/12/22/kondisi-miris-buruh-perempuan-di-kebun-sawit/>
3. Factsheet Indonesia Budget Center